

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 DI  
KABUPATEN BOJONEGORO  
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro)**

**Sri Kasiami**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro  
[sri.kasiami@gmail.com](mailto:sri.kasiami@gmail.com)

***Abstract***

There are 2 types of roadside parking service fees in Bojonegoro Regency, namely subscription parking for vehicles with Bojonegoro Regency plates and daily parking for vehicles with outer plates Bojonegoro Regency. The purpose of the study was to determine and analyze the implementation of parking service fees on the side of public roads. In the implementation of public policy based on the theory of George C. Edward III, there are four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure to achieve success.

This study uses a descriptive qualitative approach and data collection techniques carried out namely observation, interviews and documentation. While the method of analysis in the form of data reduction, data presentation and data interpretation. The results showed that the implementation of the parking service retribution on the side of the public road on Jl. Kartini and Jl. Panglima Sudirman there was a deviation in the communication variable where in the process of delivering information and the consistency was uneven, there were still people who did not understand related to the policy and the resource variables on Jl. Kartini still lacks facilities and infrastructure in the form of not installing brakes, road markings and road signs that can support the success of implementing the parking service levy on public roads.

*Keywords : Implementation, Public Policy, Parking Retribution, Service*

***Abstrak***

Dalam pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman terjadi penyimpangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Pada implementasi kebijakan publik berdasarkan teori George C. Edward III terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk mencapai keberhasilan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis berupa reduksi data, penyajian data dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman terjadi penyimpangan dalam variabel komunikasi dimana dalam proses penyampaian informasi dan konsistensi kurang merata masih ada masyarakat yang belum faham terkait dengan kebijakan tersebut dan variabel sumberdaya yang ada di Jl. Kartini masih kurangnya sarana dan prasarana berupa belum terpasangnya berem, marka jalan dan rambu jalan yang dapat mendukung keberhasilan dari implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan Publik, Retribusi Parkir, Pelayanan

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 64 bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>6</sup> Maka ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ada 2 macam pelayanan parkir antara lain parkir harian dan parkir berlangganan. Setiap tahunnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro bersama dengan pembayarana pajak kendaraan bermotor di kantor samsat dengan tarif retribusi yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 berdasarkan pasal 2 tentang Struktur penyesuaian besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); dan

- c. Kendaraan Bermotor roda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harian adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor beroda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan JBB < 3500 Kg sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
- c. Kendaraan JBB > 3500 Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penerapan retribusi parkir berlangganan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat pengguna parkir agar dapat menciptakan arus lalu lintas yang tertib, aman dan lancar, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro, hasil pemungutan Retribusi parkir dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, serta dapat meringankan pengguna jasa parkir kendaraan berplat Kabupaten Bojonegoro atau parkir berlangganan dengan membayar retribusi parkir berlangganan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal pembayaran tarif berlangganan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak samsat Kabupaten Bojonegoro. Adapun jumlah juru parkir di Kabupaten Bojonegoro yang di rekrut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 270 orang yang disebar di 37 kawasan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan masyarakat diberikan bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum berupa pemberian stiker logo parkir berlangganan. Sedangkan bagi parkir harian atau kendaraan berplat luar daerah Kabupaten Bojonegoro tetap dikenakan tarif. Namun kenyataannya masih ada warga yang mengeluh dengan pelayanan parkir berlangganan. Pasalnya di lapangan masih terdapat oknum Juru Parkir yang memakai

seragam Dinas Perhubungan tetap memungut parkir terhadap masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan. Hal tersebut di alami oleh salah satu masyarakat Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro diminta membayar parkir kendaraannya di salah satu toko di Jl. Kartini Kota Bojonegoro. “Saat itu ada perasaan bingung karena motor saya sudah pakai stiker parkir berlangganan, tapi masih ditarik biaya parkir. Dan pada akhirnya saya kasih”.

Kendala lain yang dialami masyarakat dengan adanya tarif parkir berlangganan adalah masyarakat belum tau kawasan bebas parkir tanpa adanya pemungutan ganda, masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan tersebut apalagi masyarakat yang berasal dari pedesaan yang jarang ke perkotaan, masyarakat juga belum tau kegunaan tarif parkir berlangganan yang ditandai dengan stiker logo parkir berlangganan.

Disisi lain masyarakat masih memberi uang kepada juru parkir dikarenakan rasa iba, padahal hal tersebut sudah tugas dan kewajiban sebagai juru parkir. Serta pihak Dinas Perhubungan juga mempunyai kebijakan larangan memungut dan meminta kepada masyarakat, disisi lain ada juga larangan memberi kepada petugas parkir karena petugas sudah mendapatkan gaji setiap bulannya.

Bahwa penerapan tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan tidak pernah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana sudah berjalan selama 9 tahun berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Edi Subroto selaku Sekretaris Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan a) sisi ekonomi masyarakat dimana pada tahun 2020 masyarakat Kabupaten Bojonegoro terdampak covid 19 dengan

adanya virus tersebut aktivitas masyarakat terganggu b) mempunyai silva yang tidak sedikit dan cukup signifikan sebesar 2 triliun lebih c) beberapa periode bupati terjebak dan nilai pendapatan yang diperoleh sangat tinggi, dimana pendapatan tersebut berasal dari dana bagi hasil migas. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan kendala yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan masalah yang ada sehingga peneliti mengangkat judul Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Fokus penelitian ini mengacu pada Implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman di Kabupaten Bojonegoro dikaitkan dengan teori George C. Edward III dalam buku Leo Agustino yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Dimana informan ditentukan dengan kriteria tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah Miles dan Huberman, yang memiliki 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Variabel yang pertama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan baik jika kebijakan tersebut mudah difahami oleh seluruh individu. Kebijakan tersebut juga harus dikomunikasikan sesuai maksud dan tujuan dengan akurat, tepat serta konsisten.

Dalam implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan keterangan diatas pada variabel komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sudah dijalankan. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menyampaikan informasi kepada para pelaksana dan masyarakat berupa kegiatan sosialisasi. Penyampaian informasi kepada juru parkir setiap tahun selalu diberikan sosialisasi maupun pengarahan tentang kebijakan tersebut. Kemudian juru parkir mengimplementasikannya dilapangan.

Sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum juga melalui kegiatan sosialisasi secara langsung di lapangan dan juga sosialisasi melalui media sosial atau media elektronik. Namun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat mengaku ada yang sudah mendapatkan sosialisasi dan ada juga yang belum. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih belum merata, karena masih ada masyarakat yang tidak mengerti atau tidak memahami tentang implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan.

Dan masih ada masyarakat yang belum tau kawasan mana saja yang merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Bojonegoro selain di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman. Sehingga masih ada masyarakat yang suka memberi kepada juru parkir, padahal hal tersebut sudah dilarang oleh pihak Dinas Perhubungan. Hal ini merupakan tugas

Dinas Perhubungan untuk lebih semangat lagi dalam kegiatan bersosialisasi kepada semua masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan. Karena tidak semua masyarakat pedesaan faham tentang media elektronik. Selain dalam penyampaian informasi juga konsistensi dari para pelaksana kebijakan juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum bahwa pihak Dinas Perhubungan belum konsisten dan jarang dalam menyampaikan informasi dengan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

## 2. Sumber Daya

Variabel yang kedua dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya. Pada variabel sumber daya ada dua indikator yaitu sumber daya manusia berupa staff dan fasilitas atau sarana dan prasarana.

Dalam implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan keterangan diatas pada indikator sumber daya manusia yaitu staff yang memadai dan berkompeten pada bidangnya. Staf yang ada di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kasi Pengelolaan Perpustakaan berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 kepala seksi serta 11 lainnya adalah staf pelaksana. Sedangkan jumlah juru parkir yang ada di Jl. Kartini berjumlah 8 dan di Jl. Panglima Sudirman berjumlah 14 orang yang di bagi 2 shift yaitu shift pagi dan shift malam. Sedangkan indikator fasilitas atau sarana dan prasana sebagai pendukung dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Hal ini berdasarkan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian kepada masyarakat bahwa fasilitas yang diberikan

dalam pelayanan berupa ditata dengan rapi, sopan, ramah dan lainnya sudah terlaksana cukup baik. Masyarakat mengaku bahwa sarana dan prasarana yang ada di Jl. Kartini masih kurang, seperti belum adanya traffic cone kerucut, garis batas parkir, belum disediakan berem atau marka jalan yang gunanya untuk parkir. Sedangkan di Jl. Panglima Sudirman sudah tampak diberikan traffic cone kerucut yang bertujuan untuk memberikan batasan kendaraan yang akan parkir di tepi jalan umum, namun untuk berem dan marka jalan belum diberikan.

### 3. Disposisi

Variabel yang ketiga dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan akan berpengaruh pada kinerja kebijakan karena pelaksanaan kebijakan berdasarkan sikap, komitmen dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang baik dan tepat, sehingga keberhasilan dalam implementasi kebijakan lebih besar.

Dalam variabel disposisi ini ada 2 indikator yaitu pengangkatan pelaksana kebijakan atau rekrutmen dan insentif. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pengangkatan pelaksana kebijakan bahwa juru parkir yang sudah lama kemudian dilakukan rekrutmen atau di angkat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Jumlah juru parkir yang ada di Jl. Kartini berjumlah 8 orang dan di Jl. Panglima Sudirman berjumlah 14 orang yang terbagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi (07.30-15.00) dan shift sore (07.30-15.00). Sedangkan berdasarkan hasil penelitian indikator insentif bahwa juru parkir di tepi jalan umum itu tidak mendapatkan insentif tetapi mereka langsung digaji setiap bulannya, namun ada juru parkir yang mendapatkan uang tambahan berupa masih menerima uang pemberian dari masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum

khususnya parkir berlangganan atau kendaraan berplat Kabupaten Bojonegoro.

Komitmen Dinas Perhubungan dalam implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat serta dilarang memungut dan meminta kepada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum khususnya parkir berlangganan. Dan semua harus diberikan karcis bagi kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Bojonegoro dan untuk kendaraan berplat Kabupaten Bojonegoro gratis.

Namun pola pikir masyarakat itu berbeda-beda, sehingga masih ada yang memberi uang kepada juru parkir dan juru parkir menerimanya namun dari pihak Dinas Perhubungan melarangnya. Karena juru parkir sudah diberikan gaji setiap bulannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Variabel yang keempat dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Pada variabel ini ada 2 indikator yaitu Standar Operating Procedures (SOPs) dan fragmentasi. Dimana prosedur dasar kerja merupakan standar atau prosedur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dengan adanya prosedur dasar kerja maka suatu implementasi kebijakan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl, Panglima Sudirman Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil penelitian pada indikator Standar Operating Procedures (SOPs) sudah ditetapkan, difahami dan dilaksanakan berupa adanya surat tugas yang dimiliki oleh juru parkir dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Dengan adanya SOP, semua para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan indikator yang kedua

yaitu fragmentasi, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pembagian tugas dan tanggung jawab Juru Parkir dan pihak Dinas Perhubungan sudah dilakukan secara baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro)” dapat disimpulkan bahwa ada empat variabel untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III antara lain: 1. Variabel komunikasi masih terjadi penyimpangan dalam penyampaian informasi dan konsistensi terutama di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman, masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum dan masyarakat juga masih belum tau kawasan mana yang merupakan pelayanan parkir ditepi jalan umum, namun untuk konsistensi dalam kegiatan sosialisasi masih kurang maksimal. Sehingga masih ada masyarakat yang suka memberi kepada juru parkir, padahal hal tersebut sudah dilarang oleh pihak Dinas Perhubungan.

2. Variabel Sumber daya, untuk sumber daya manusia yaitu staff di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kasi Pengelolaan Perparkiran sudah cukup memadai dan untuk juru parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman sudah efektif. Dalam hal fasilitas seperti kendaraan di tata rapi, petugasnya sopan, ramah sudah baik. Untuk sarana dan prasarana seperti berem, marka jalan dan rambu masih belum terpasang. Namun di Jl. Panglima Sudirman sudah diberikan traffic cone kerucut sebagai tanda batas kendaraan yang akan parkir ditepi jalan umum.

3. Variabel Disposisi dalam rekrutmen atau pengangkatan pelaksana

kebijakan yaitu dengan merekrut juru parkir yang sudah lama sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pihak Dinas Perhubungan. Sedangkan insentif yang diberikan untuk juru parkir itu tidak ada, namun juru parkir mendapatkan gaji setiap bulannya.

4. Variabel Struktur birokrasi meliputi Standar Operating Procedure (SOPs) yaitu berupa surat tugas yang dimiliki oleh juru parkir dalam melaksanakan tugas dilapangan dan fragmentasi juga sudah dilaksanakan cukup baik dibuktikan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab terkait implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2016
- Hanif, Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Moleong, Lexy, Prof. Dr., MA. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015.

### Peraturan-peraturan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2019 Tentang

Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

**Jurnal :**

- Aisyah, Nadya. Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Jalan Umum Di Kota Binjai. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan. 2018.
- Bambang, Tri. Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makasar. 2016.
- Juniasari, Putu Ayu Mentari. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya. Universitas Surabaya. 2014.

- Mayasari, Putri. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Skripsi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijawa. Malang. 2018.
- Miftahul Jannah, A. Nuraeni Aksa, Muhammad Tahir. Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Makasar. Jurnal Administrasi Publik. Makasar. 2015.
- P. Labaeni, Rahmat, dkk. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Administrasi Publik No.31 VOL III. Kotamobagu. 2015.
- Putra, Ikhsan Risniawan. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Bangkinang Kota. JOM FISIP. Volume 5:Edisi I. Universitas Riau. 2018.
- Setiaji, Darari Priya, dkk. Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. Jurnal Universitas Diponegoro. 2017.
- Sulila, Ismet. Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo. 2016.